



KABUPATEN PASURUAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026



DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASURUAN
Nomor : 39 Tahun 2025
Perihal : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

IX. DINAS KETENAGAKERJAAN

**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Bab I pasal 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berorientasi pada proses, sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan dimaksud maka proses pencapaian tujuan dari pembangunan akan dapat dicapai dengan lebih terarah dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita – citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dan pemangku kepentingan, sehingga bisa diperoleh rencana kerja yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan yaitu pelatihan kerja berbasis kompetensi dan bersertifikat, sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 .

Adapun penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
2. Tahap Penyajian Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
3. Tahap Perjanjian Rancangan Akhir

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 5) Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 8) Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 9) Permen terkait SPM (sesuai urusan)
- 10) Permen teknis lainnya (sesuai urusan)
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 12) Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Intruksi Presiden no. 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan gender (PUG);
- 13) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 18) Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 19) Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 25) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
- 27) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 ;
- 28) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
- 29) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 177 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dengan Peraturan Bupati Pasuruan;

- 30) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD 2024-2026;
- 31) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan Maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program, kegiatan sub kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan Tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat dalam bentuk pelatihan kerja berbasis kompetensi dan bersertifikat dengan dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2026;
3. Optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis perangkat daerah Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Memprioritaskan pembangunan daerah dalam penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat dengan banyaknya jumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi yang bersertifikat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB. V. PENUTUP

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan tahun lalu (2025). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan tahun-tahun sebelumnya. Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan selama tahun 2025.

❖ **Urusan Ketenagakerjaan**

a. **Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, peningkatan kesejahteraan para pekerja, ketenangan dan kenyamanan berusaha. Pembangunan bidang ketenagakerjaan selama ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain semakin tingginya jumlah pencari kerja dan angkatan kerja, sementara tingkat penyerapan tenaga kerja tidak bisa mengimbangi kenaikan tersebut, sehingga tingkat pengangguran terbuka ikut naik, terbatasnya penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja dan masih rendahnya tingkat produktivitas para pekerja/buruh. Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan dalam kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta

peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan kerja yang didukung dengan sistem Informasi Pasar Kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya, selain itu perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga menjadi elemen penting dalam mendukung ekosistem Ketenagakerjaan yang baik. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh pada semua lini yang terkait ketenagakerjaan.

Anggaran belanja langsung tahun 2024 sebesar Rp. 15.192.341.338,- atau 82,81 % dari anggaran yang tersedia Rp. 17.432.160.215,- secara rinci tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.1

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2025 s/d Tahun 2029
 Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n- 3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	100	100%	100	100	100	100	100%

2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3 Dokumen	3	3	3	3	100%
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3 Dokumen	3	3	3	3	100%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Tunjangan ASN	12	12	12 Dokumen	12	12	12	12	100%
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12	12	12 Dokumen	12	12	12	12	100%

2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	12	12	12 Dokumen	12	12	12	12	100%
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bukti Pembayaran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12 Dokumen	12	12	12	12	100%
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	0	0 Paket	0	0	0	0	0
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3	3	3 Kali	3	3	3	3	100%
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100	100 Orang	100	100	100	100	100%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	50 Kali	50	50	50	50	100%
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100	100	100%	100	100	100	100	100%

2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1 Paket	1	1	1	1	100%
2.07.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1	1	1 Unit	1	1	1	1	100%
2.07.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	1	1 Paket	1	1	1	1	100%
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	1 Unit	1	1	1	1	100%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	900	900	900 Surat	900	900	900	900	100%
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bukti Pembayaran Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12 Dokumen	12	12	12	12	100%
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1 Paket	1	1	1	1	100%

2.07.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1	1	1 Paket	1	1	1	1	100%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	14	14 Kendaraan	14	14	14	14	100%
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	14 Kendaraan	14	14	14	14	100%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	2	2 Gedung	2	2	2	2	100%
2.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	2	2 Gedung	2	2	2	2	100%

2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen RTK yang disusun	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen RTK	1	1	1Dokumen	1	1	1	1	100%
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen RTK	1	1	1 Dokumen	1	1	1	1	100%
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Laporan Ketenagakerjaan	1	1	1 Dokumen	1	1	1	1	100%
2 07 02	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	43	43	40,47%	43	43	43	43	100%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000 pencaker	5000	5000	5000	5000	100%
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Layanann AKAD dan AKL	5000	5000	5000 pencaker	5000	5000	5000	5000	100%
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200	200	200 orang	200	200	200	200	100%

2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20	20	20 orang	20	20	20	20	100%
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Wirausaha Baru	160	160	160 orang	160	160	160	160	100%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase Informasi Pasar Kerja	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	1	1 Paket	1	1	1	1	100%
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair Bursa Kerja	5000	5000	5000 Pencaker	5000	5000	5000	5000	100%
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Perlindungan PMI (PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah)	100	100	100%	100	100	100	100	100%

2.07.04,2.04.02	Penyuluhan Calon Pekerja Migran Indonesia Pra Penempatan	Jumlah Peserta Calon Pekerja Migran Indonesia Pra Penempatan yang mengikuti penyuluhan	50	50	50 Orang	50	50	50	50	100%
2.07.04,2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	25	25	25 Orang	25	25	25	25	100%
2.07.04.2.05	Pembinaan Kepada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pengesahan RPTKA Perpanjangan satu lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pembinaan Kepada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pengesahan RPTKA Perpanjangan satu lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.04.2.05.01	Penyebarluasan informasi tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing	Jumlah Penyebarluasan informasi tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing	25	25	25 Perusahaan	25	25	25	25	100%

	Monitoring dan evaluasi Kepada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah Monitoring dan evaluasi Kepada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	25	25	25 Perusahaan	25	25	25	25	100%
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P1)	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	50	50	50%	50	50	50	50	100%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi	500	500	500 Peserta	500	500	500	500	100%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	500	500	500 Peserta	500	500	500	500	100%
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Dokumen Kerjasama	2	2	2 Lembaga	2	2	2	2	100%
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan & Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	1	1Unit	1	1	1	1	100%

2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Pembinaan Lembaga LPK Swasta	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.03.2.01.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga LPK Swasta	14	14	14 Lembaga	14	14	14	14	100%
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah SDM Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	2	2	2 SDM	2	2	2	2	100%
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Konsultasi yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10	10	10 Perusahaan	10	10	10	10	100%
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tenaga Kerja yang memperoleh Konsultasi Produktivitas Kerja	100	100	100%	100	100	100	100	100%

2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Konsultasi Produktivitas & Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10	10	10 Perusahaan	10	10	10	10	100%
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	62	62	62%	62	62	62	62	100%
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan terdaftar yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online	75	75	75%	75	75	75	75	100%

2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online	30	30	30 Perusahaan	30	30	30	30	100%
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30	30	30 Perusahaan	30	30	30	30	100%
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	15	15	15 Perusahaan	15	15	15	15	100%

2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	62	62	62%	62	62	62	62	100%
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang berhasil dicegah	50	50	50 kasus	50	50	50	50	100%
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50	50	50 kasus	50	50	50	50	100%

2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5	5	5 SP/SB	5	5	5	5	100%
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	5	5	5 Laporan	5	5	5	5	100%
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	47600	0	0 Orang	0	0	0	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor	50	50	50%	50	50	50	50	100%
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lokasi Transmigrasi yang Termonitor	50	50	50%	50	50	50	50	100%

3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Termonitor	5	5	5 Kawasan	5	5	5	5	100%
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Transmigrasi	50	50	50 Orang	50	50	50	50	100%
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Pelatihan Kepada Calon Transmigran	50	50	50 Orang	50	50	50	50	100%

PD: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Tabel 2.1.A
 Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	100%	Memenuhi Target 100%	a. Rendahnya realisasi belanja pada tribulan I dan besarnya realisasi belanja pada tribulan IV.b. Implementasi aplikasi dari Pemerintah Pusat (SIPD) belum bisa mengakomodir kebutuhan pengelolaan keuangan di daerah dari tahap perencanaan - pengangguran - penatausahaan - pelaporan. Sehingga diperlukan aplikasi pendamping untuk percepatan proses penatausahaan dan pelaporannya; danc. Adanya perubahan – perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga membutuhkan penyesuaian – penyesuaian dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan.	Akan dilakukan analisis mendalam untuk memahami penyebab rendahnya realisasi belanja pada Triwulan I.Identifikasi sektor atau program yang mengalami kendala dan perlu peningkatan.P erbaikan Proses Pelaksanaan Anggaran:Aka n ditinjau dan diperbaiki utamanya proses pelaksanaan anggaran pada awal tahun, termasuk persiapan kontrak dan pembayaran.P erkuat koordinasi antara unit-unit yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.mem berikan pelatihan kepada pengelola keuangan terkait penggunaan aplikasi SIPD dan pendamping, serta

				mensosialisasi kan manfaat dan tata cara penggunaan aplikasi tersebut.Pema haman Regulasi Baru:Identifik asi dampak perubahan regulasi terhadap penganggaran dan penatausahaa n keuangan.Mela kukan penyesuaian dalam penganggaran sesuai dengan perubahan regulasi yang berlaku.Mema stikan semua aspek penganggaran mencerminka n kepatuhan terhadap regulasi terbaru.Memas tikan sistem pelaporan keuangan mencakup perubahan regulasi terbaru.Melap orkan secara periodik terkait kepatuhan terhadap regulasi baru.
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%		
Pelayanan antar Kerja	100%	Memenuhi Target 100%		
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100%	Memenuhi Target 100%		

Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100%	Memenuhi Target 100%
Perluasan Kesempatan Kerja	100%	Memenuhi Target 100%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	Memenuhi Target 100%
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	100%	Memenuhi Target 100%
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	100%	Memenuhi Target 100%
Job Fair/Bursa Kerja	100%	Memenuhi Target 100%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%
Penyuluhan Calon Pekerja Migran Indonesia Pra Penempatan	100%	Memenuhi Target 100%
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	100%	Memenuhi Target 100%
Pembinaan Kepada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pengesahan RPTKA Perpanjangan satu lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%
Penyebarluasan informasi tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing	100%	Memenuhi Target 100%
Monitoring dan evaluasi Kepada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	100%	Memenuhi Target 100%

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P1)	100%	Memenuhi Target 100%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	Memenuhi Target 100%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	Memenuhi Target 100%
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100%	Memenuhi Target 100%
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	Memenuhi Target 100%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	Memenuhi Target 100%
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100%	Memenuhi Target 100%
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	100%	Memenuhi Target 100%
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	Memenuhi Target 100%
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100%	Memenuhi Target 100%

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Memenuhi Target 100%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100%	Memenuhi Target 100%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100%	Memenuhi Target 100%
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	100%	Memenuhi Target 100%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	100%	Memenuhi Target 100%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	100%	Memenuhi Target 100%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	100%	Memenuhi Target 100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	100%	Memenuhi Target 100%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100%	Memenuhi Target 100%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah	100%	Memenuhi Target 100%

Kabupaten/Kota				
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Memenuhi Target 100%		
Penyuluhan Transmigrasi	100%	Memenuhi Target 100%		
Pelatihan Transmigrasi	100%	Memenuhi Target 100%		

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran yang akan dicapai pada urusan ketenagakerjaan sebagaimana salah satu sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 yaitu terciptanya peningkatan kualitas tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran di atas dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut:

2.2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.1 Urusan Ketenagakerjaan & Urusan Transmigrasi

Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas tenaga kerja yang produktif, terampil, mandiri, berjiwa wirausaha dan beretos kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk menjamin setiap warga masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan yang layak. Pemerintah Kabupaten sebagai regulator ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya melalui kebijakan daerahnya. Disamping itu terhadap warga masyarakat yang telah bekerja, pemerintah daerah juga harus bisa menjamin bahwa seluruh pekerja memperoleh hak-haknya sebagai pekerja. Keselamatan kerja, kesehatan kerja, sistem pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan kebebasan berserikat harus dapat dirasakan oleh pekerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan ketenaga kerjaan san

Urusan Transmigrasi adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan bidang ketenagakerjaan diarahkan kepada semakin berkurangnya pengangguran dengan menciptakan kesempatan berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, penciptaan iklim usaha yang dapat menarik investasi, terkendalinya tingkat kepadatan penduduk.

Sasaran yang akan dicapai pada urusan ketenagakerjaan adalah terciptanya peningkatan kualitas tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran di atas dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel. T.C 30
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Tabel 2.2
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya Kualitas & Penyerapan Tenaga Kerja	94,23	94,30	94,40	94,45	94,23	94,30	94,40	94,45	Termasuk Angkatan Kerja Berusia 15 Tahun Ke Atas Selain kategori bukan Angkatan kerja (Ibu, Rumah Tangga, Anak Sekolah, dll)

	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	93,50%	94,00%	94,50%	95%	93,50%	94,00%	94,50%	95%	Dinas Ketenagakerjaan Optimis untuk capaian Pelatihan berbasis Kompetensi di atas 90% karena telah terseleksi dengan baik di level UPT LKD
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 128.487.176,21	Rp. 128.656.779,28	Rp. 128.827.893,00	Rp. 128.827.893,00	Rp. 128.487.176,21	Rp. 128.656.779,28	Rp. 128.827.893,00	Rp. 128.827.893,00	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja akan membaik seiring dengan membaiknya iklim investasi di Kabupaten Pasuruan

	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	9,58%	9,68%	9,79%	9,89%	9,58%	9,68%	9,79%	9,89%	Ketaatan Perusahaan untuk memenuhi setiap kewajiban yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan dapat di pantau melalui pengawasan yang ketat, saat ini tugas pengawasan tidak lagi berada di Kabupaten Kota, sehingga diperlukan koordinasi dan tentunya dukungan anggaran yang cukup untuk memperoleh gambaran utuh akan ketaatan Perusahaan
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

										atas tata kelola kerja yang alayak

	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	41,00%	41,50%	42,00%	42,50%	41,00%	41,50%	42,00%	42,50%	
	Presentase Monitoring Kawasan Transmigrasi	% 50,5	51%	51,50%	52%	% 50,5	51%	51,50%	52%	

- ❖ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,67 % dibandingkan tahun 2022 70,55 hal ini disebabkan oleh terjadinya penambahan jumlah penduduk yang bekerja. TPAK Kabupaten Pasuruan pada Agustus 2023 tercatat sebesar 71,22 %
- ❖ Indikator ini mempunyai pengertian pencari kerja yang terdaftar dan tercatat yang diterima bekerja oleh pemberi kerja. Angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan adalah para calon tenaga kerja yang bekerja dalam institusi pemerintah maupun perusahaan, bekerja di luar negeri sebagai TKI/PMI maupun melakukan wirausaha mandiri. Penempatan tenaga kerja bidang penempatan ini sebesar 41,00 % (Jumlah Penempatan Kerja sebesar 2.025 orang dibagi Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar sebanyak 5.003 orang dikalikan 100 %) penempatan yang berasal dari penempatan Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara melalui sektor formal dan informal. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah Peralihan menyebabkan Perusahaan belum sepenuhnya siap melakukan rekrutment tenaga kerja (sektor formal) dikarenakan demand yang belum stabil, ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (tidak terjadi link and match) Peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industry. Beberapa upaya yang dilakukan Optimalisasi penyebarluasan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan bursa kerja dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- ❖ Secara berkala pemerintah daerah mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja dengan jaminan kualitas dalam bentuk uji kompetensi bagi peserta tahun 2023 terdapat peserta lulus ujian kompetensi sebanyak 95,00 % (Peserta yang lulus uji kompetensi sebanyak 1068 orang dibagi jumlah peserta yang ikut pelatihan sebanyak 1120 orang) atau terdapat penambahan/peningkatan presentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi sebesar 4,46 % dibandingkan tahun 2022 yang meluluskan 91% peserta. Dengan adanya sertifikat kompetensi maka tenaga kerja

memiliki daya saing dan mempunyai kesempatan yang lebih besar mengisi lowongan kerja yang tersedia.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 177 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk Permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain:

- ❑ Permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, yaitu :
 - ❑ Masalah Tenaga Kerja :
 - 1) Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
 - 2) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
 - 3) Rendahnya tingkat SDM;
 - 4) Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan;
 - 5) Tidak seimbangnya penerimaan tenaga kerja;
 - 6) Rendahnya kompetensi pencari kerja;
 - 7) Masih rendahnya perlindungan terhadap pekerja rentan utamanya perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - 8) Kurangnya pegawai teknis (Instruktur, Mediator, Pengantar Kerja).
 - ❑ Masalah Transmigrasi :
 - 1) Tidak seimbangnya animo masyarakat bertransmigrasi dengan kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar Jawa yang diberikan pemerintah pusat;

Penentuan isu-isu strategis

NO	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1	Meningkatnya Ketrampilan Pencaker, Penempatan dan Perluasan Kerja dengan indikator sasara sebagai berikut :	1 Lapangan pekerjaan semakin terbatas	1 Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi, sebagai keterbatasan lowongan pekerjaan/kesempatan kerja;
	- Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2 Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka	2 Kualitas kompetensi angkatan kerja/pencari kerja tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha;
	- Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	3 Rendahnya tingkat pendidikan	3 Optimalisasi operasional di UPT LKD belum optimal karena terkendala SDM Instruktur.
	- Persentase Rasio Penduduk yang Bekerja	4 Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan	
		5 Tidak seimbangnya penerimaan tenaga kerja;	
		6 Rendahnya kompetensi pencari kerja;	
2	Menurunnya Tingkat Perselisihan Pekerja dan Pengusaha sesuai UU Ketenagakerjaan dengan indikator sasaran sebagai berikut		4 Sinergi antar pelaku usaha dengan unsur serikat masih belum optimal;
	- Persentase Perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kurangnya pegawai teknis (Instruktur, Mediator, Pengantar Kerja)	5 Kestabilan konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
		Masih rendahnya perlindungan pekerja rentan utamanya perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan	6 Bantuan insentif iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK & JKM)

3	Tersedianya calon – calon transmigrasi yang siap diberangkatkan ketempat tujuan dengan indikator sasaran sebagai berikut	Tidak seimbangnya animo masyarakat bertransmigrasi dengan kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar jawa yang diberikan pemerintah pusat	6 Pemberangkatan calon transmigran tidak Optimal/sering tertunda keberangkatannya (kuota calon ditentukan oleh pemerintah pusat);
	Kerjasama antar - daerah kawasan transmigrasi		
	Calon transmigrasi - yang diberangkatkan		

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah :
 - ✓ Masih terbatasnya perluasan kesempatan kerja;
 - ✓ Masih kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat;
 - ✓ Kurangnya tenaga fungsional instruktur, pengantar kerja dan mediator.
 - ✓ Masih adanya perusahaan yang belum mentaati peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja;
 - ✓ Masih adanya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh;
 - ✓ Banyaknya kesempatan bekerja ke luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia akibat ketidak sesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kesempatan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;
 - ✓ Kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar pulau jawa yang masih ditentukan oleh pemerintah pusat;
 - ✓ Masih banyaknya transmigran yang pulang pergi.

2. Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan adalah :

- ☐ Kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya;
- ☐ Lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global;
- ☐ Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja;
- ☐ Tekanan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil (UMK yang tinggi);

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 menetapkan indikator capaian kinerja, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, kondisi eksisting tahun 2023 sebesar 5,48 %, tahun diperkirakan pada tahun 2024 sebesar 5,02 %. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka di peroleh dengan penghitungan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di kali 100.

Tingkat Pengangguran Terbuka dapat ditingkatkan dengan meningkatnya penempatan tenaga kerja, meningkatnya jumlah pencari kerja yang bersertifikasi sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja, menurunnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang bermasalah, menurunnya angka perselisihan hubungan industrial di perusahaan – perusahaan sehingga bisa mengurangi angka pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan kondisi yang kondusif dalam hubungan industrial. Pengiriman peserta transmigrasi yang memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai kebutuhan daerah tujuan juga bisa mendukung dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Upah minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2025 mencapai Rp. 4.866.890,- sehingga kebutuhan minimum para pekerja di Kabupaten Pasuruan dapat terpenuhi. UMK tinggi, pekerja sejahtera, daya beli masyarakat meningkat.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, di Kabupaten Pasuruan yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu-isu strategis, maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang nyata, didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan, disusunlah program-program sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Peningkatan Kesempatan Kerja;
- c. Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja;
- d. Penempatan Transmigrasi

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA					URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan				
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	29.737.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	29.737.000,00	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	4.821.041.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	4.821.041.000,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	12	16.020.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	12	16.020.000,00	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	0		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12	10.265.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12	10.265.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	20.132.100,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	20.132.100,00	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3	19.960.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3	19.960.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	20.350.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	20.350.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	50	88.508.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	50	88.508.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi			
	Pengadaan Mebel	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10.050.200,00	Pengadaan Mebel	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10.050.200,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan		0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan		0	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		0\	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	148.500.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	148.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia			
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	900	15.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	900	15.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	547.122.855,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	547.122.855,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	21.359.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	21.359.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1	41.402.200,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1	41.402.200,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase BMD kondisi baik			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase BMD kondisi baik			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	151.716.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14	151.716.500,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	22.960.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	14	22.960.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	84.680.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /	2	84.680.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	173.620.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2	173.620.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase RTK yang dievaluasi sesuai ketentuan			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase RTK yang dievaluasi sesuai ketentuan			
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase Tersusnya Dokumen RTK Makro sesuai ketentuan	1	12.020.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Tersusnya Dokumen RTK Makro sesuai ketentuan	1	12.020.000,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5	120.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5	120.000,00	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan			
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			
	Pelayanan antar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Layanann AKAD dan AKL	5.000	75.430.000,00	Pelayanan antar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Kerja yang ditempatkan Melalui Layanann AKAD dan AKL	5.000	75.430.000,00	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200	15.000.000,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan	200	15.000.000,00	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20	35.000.000,00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan	20	35.000.000,00	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Peserta Wirausaha Baru	160	5.000.000,00	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Peserta Wirausaha Baru	160	5.000.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Informasi Pasar Kerja			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Informasi Pasar Kerja			
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	40.000.000,00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar	1	40.000.000,00	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistim Online	100	10.000.000,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja	100	10.000.000,00	

	Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair Bursa Kerja	5.000	30.000.000,00	Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair Bursa	5.000	30.000.000,00	
	<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Pelayanan Perlindungan PMI (PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah)			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Pelayanan Perlindungan PMI (PMI Pra dan Purna			
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	50	100.000,00	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	50	100.000,00	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	25	30.000.000,00	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Pembinaan Kepada Perusahaan Pengguna Tenaga	25	30.000.000,00	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi	26,46		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi	26,46		
	<i>Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi			Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	500	6.228.671.181,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	500	6.228.671.181,00	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerjasama	12	5.000.000,00	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerjasama	12	5.000.000,00	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan & Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10	1.000.000.000,00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Pengadaan & Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10	1.000.000.000,00	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan	1	100.000,00	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			1	100.000,00	
	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Pembinaan Lembaga LPK Swasta			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Pembinaan Lembaga LPK Swasta			
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Pembinaan Lembaga LPK Swasta	14	73.535.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Pembinaan Lembaga LPK Swasta	14	73.535.000,00	
	<i>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</i>	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah SDM Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	2	24.600.000,00	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara	2	24.600.000,00	
	<i>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			

	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Peserta Konsultasi yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10	24.353.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Konsultasi yang mendapat Konsultasi Peningkatan	10	24.353.000,00	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Presentase Tenaga Kerja yang memperoleh Konsultasi Produktivitas Kerja			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Tenaga Kerja yang memperoleh Konsultasi Produktivitas			
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Konsultasi Produktivitas & Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10	22.512.000,00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Konsultasi Produktivitas & Daya Saing Tenaga Kerja di	10	22.512.000,00	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase PPHI yang diselesaikan dengan anjuran/PB			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Prosentase PPHI yang diselesaikan dengan anjuran/PB			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Perusahaan terdaftar yang Melaksanakan Pengesahan PP			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online	30	100.000,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait	30	100.000,00	
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30	100.000,00	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30	100.000,00	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	15	100.000,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah dan LKS	15	100.000,00	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan			
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah perselisihan yang berhasil dicegah	50	100.000,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah perselisihan yang berhasil dicegah	50	100.000,00	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50	100.000,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50	100.000,00	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5	100.000,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5	100.000,00	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	5	239.930.000,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	5	239.930.000,00	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	47.600	5.000.000.000,00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	47.600	5.000.000.000,00	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor			

[illegible]

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 tersebut di atas merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD. Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum PD, sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan PD berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kabupaten Pasuruan untuk mengisi Renja PD Tahun 2026. Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2026 dan Penyusunan RKPD Tahun 2024. Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, ada rancangan Renja Tahun 2026 pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan yang masih melebihi pagu indikatif, namun secara nilai total tetap sesuai dengan pagu yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan yang memang dirasakan penting untuk dilaksanakan pada tahun 2026, dalam rangka menunjang RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Tabel T-C 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU

KEPENTINGAN TAHUN 2026

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Usulan	Alamat	Catatan
	Program Pelatihan Kerja dan Produktitas					
1	Pelatihan berbasis Kompetensi	Desa Gajahrejo, Kab. Pasuruan, Purwodadi, Gajahrejo	kurangnya lapangan kerja dan masih banyak anak muda yg masih belum bekerja	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Desa Gajahrejo, Kab. Pasuruan, Purwodadi, Gajahrejo	Aspirasi
2	Pelatihan berbasis Kompetensi	Desa Ngadiwono, Kab. Pasuruan, Tosari, Ngadiwono	Perlu peningkatan sistem informasi digital dalam memasarkan tentang pariwisata desa dan lainnya	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Desa Ngadiwono, Kab. Pasuruan, Tosari, Ngadiwono	Aspirasi
3	Pelatihan berbasis Kompetensi	DESA SELOTAMBAK, Kab. Pasuruan, Kraton, Selotambak	PEMUDA SETELAH LULUS SEKOLAH BINGUNG Mencari PEKERJAAN	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	DESA SELOTAMBAK, Kab. Pasuruan, Kraton, Selotambak	Aspirasi
4	Pelatihan berbasis Kompetensi	Dusu Ketegan Rt 03 Rw 01 Ketegan Rejoso Pasuruan, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Meningkatkan pengrajin Rajut	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Dusu Ketegan Rt 03 Rw 01 Ketegan Rejoso Pasuruan, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Aspirasi
5	Pelatihan berbasis Kompetensi	Dusun Ketegan Rt 03 Rw 01 Ketegan Rejoso Pasuruan, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Meningkatkan pengrajin Penjahit	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Dusun Ketegan Rt 03 Rw 01 Ketegan Rejoso Pasuruan, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Aspirasi
6	Pelatihan berbasis Kompetensi	Dusun Ketegan 03 Rw 01 Ketegan Rejoso Pasuruan, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Menciptakan Lapangan kerja bagi masyarakat	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Dusun Ketegan 03 Rw 01 Ketegan Rejoso Pasuruan, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Aspirasi
7	Pelatihan berbasis Kompetensi	Dusun Gayam Desa Gayam Dusun Sambisari Desa Gayam , Kab. Pasuruan, Gondangwetan, Gayam	Pelatihan Kejuruan Roda 2 bagi pemuda sebagai keahlian untuk bekal wirausaha	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Dusun Gayam Desa Gayam Dusun Sambisari Desa Gayam , Kab. Pasuruan, Gondangwetan, Gayam	Aspirasi
8	Pelatihan berbasis Kompetensi	Dusun Ampelsari RT 008 RW 003, Kab. Pasuruan, Purwodadi, Tambak Sari	Kurangnya wawasan tentang bordir	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Dusun Ampelsari RT 008 RW 003, Kab. Pasuruan, Purwodadi, Tambak Sari	Aspirasi
9	Pelatihan berbasis Kompetensi	Kelurahan Bedomungal (TP-PKK Kelurahan), Kab. Pasuruan, Bangil, Bedomungal	Meningkatkan perekonomian Masyarakat dan Mengurangi pengangguran	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Kelurahan Bedomungal (TP-PKK Kelurahan), Kab. Pasuruan, Bangil, Bedomungal	Aspirasi
10	Pelatihan berbasis Kompetensi	desa dhompo, Kab. Pasuruan, Kraton, Dhompo	belum adanya pelatihan kompetensi	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	desa dhompo, Kab. Pasuruan, Kraton, Dhompo	Aspirasi
11	Pelatihan berbasis Kompetensi	Ds Kalipucang, Kab. Pasuruan, Tuttur, Kalipucang	Banyaknya pemuda dan warga yg masih menganggur	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Ds Kalipucang, Kab. Pasuruan, Tuttur, Kalipucang	Aspirasi

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Usulan	Alamat	Catatan
	Program Pelatihan Kerja dan Produktitas					
1	Pelatihan berbasis Kompetensi	Seluruh Wilayah di kec. rembang, Kab. Pasuruan	Banyaknya tingkat pengangguran di wilayah kec. rembang	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Seluruh Wilayah di kec. rembang, Kab. Pasuruan	EPOKIR
2	Pelatihan berbasis Kompetensi	Desa Jatisari Kec Purwodadi, Kab. Pasuruan	butuh pelatihan perbengkelan	Pelatihan berbasis Kompetensi maupun non kompetensi. PENJELASAN : Pelatihan pada sasaran pencari kerja yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus	Desa Jatisari Kec Purwodadi, Kab. Pasuruan	EPOKIR

❖ **Penelaahan Usulan Program**

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dnas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang diusulkan sejalan mendukung daripada RPD Kabupaten Pasuruan disamping perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan peraturan yang mengharuskan untuk mengakomodir. Kegiatan menunjang dalam bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian secara utuh.

Kemudian dalam rangka perlindungan TKI perlu adanya payung hukum yang mengatur tentang tatacara perekrutan, perlindungan saat bekerja dan paska TKI purna. Mekanisme penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, tatacara perekrutan dan penempatan sehingga tidak terjadi monopoli tenaga kerja asing disegala sektor.

Selanjutnya dalam rangka untuk mempermudah mengakses lowongan pekerjaan bagi pencari kerja dan penyedia lowongan pekerjaan perlu adanya pembuatan software on line ketenagakerjaan, disamping itu juga penyebaran informasi bursa kerja baik melalui media massa ataupun elektronik serta pameran bursa kerja (job market fair) sangatlah dinantikan oleh para pencari kerja (job seekers).

Pembentukan lembaga kerjasama Bipartit, PP, PKB dalam perusahaan perlu didorong agar tercipta ketenangan dalam bekerja dan hak-hak pengusaha terlindungi. Hubungan yang harmonis, adil dan bermartabat antara pekerja dan pengusaha perlu ditingkatkan. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi harapan para pekerja agar mereka terlindungi baik dari segi kesehatan dan masa depan mereka. Selain itu perlu juga adanya peringatan hari Buruh

Internasional (Mayday) dalam rangka menjaga dan menjalin hubungan yang harmonis dalam hubungan industrial.

Menindaklanjuti penetapan dan penerapan usulan UMK oleh Dewan Pengupahan Kabupaten sebagai unsur pemerintah perlu untuk melaksanakan monitoring, evaluasi tentang pelaksanaan UMK, hal ini bertujuan agar dapat mengetahui seberapa banyak perusahaan yang mampu untuk menerapkan UMK. Dan bagi perusahaan yang belum menerapkan agar diwajibkan menerapkan UMK pada perusahaan masing-masing.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional :

Rumusan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan diarahkan pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dalam empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2023.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Kebijakan Nasional, Provinsi, RPD Kabupaten

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Pasuruan
Agenda : Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Tujuan 5: Menurunnya Pengangguran	Tujuan 2 : Meningkatknya Kesejahteraan & Kualitas Hidup masyarakat
Sasaran 1 : Pendapatan Perkapita setara negara Maju	Sasaran : Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Sasaran : Menurunnya Pengangguran

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Ketenagakerjaan serta tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;

- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan;
- d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 16 tahun 2016. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang, yaitu : Kabid. Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Kabid. Hubungan Industrial dan Jamsostek dan Kabid. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan sebagai panduan untuk pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah yaitu tahun 2024-2026 untuk mencapai sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan adalah :

Tahun 2024

Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan

Tahun 2025

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah

Tahun 2026

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan harus berkesinambungan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan selama 3 (tiga) tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan. Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi dan kebijakan, dengan menganalisa faktor internal yang mencakup kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (opportunity) dan kendala (threat's) sebagaimana tersebut di atas, maka strategi dan kebijakan yang dipilih

sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS : 1. Mengatasi Tingkat Pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Pasuruan; 2. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja di kabupaten Pasuruan; 3. Peningkatan sinergi antara pelaku usaha dan unsur serikat; 4. Mengatasi konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja; 5. Peningkatan pemberangkatan calon transmigran (Kualitas layanan serta Kuantitas Transmigran); 6. Optimalisasi operasional di UPT LKD Kabupaten Pasuruan; 7. Pemerataan Pelatihan kepada Tenaga Kerja di Kabupaten Pasuruan;			
Tujuan : Meningkatnya Partisipasi Tenaga Kerja Kab Pasuruan Dengan Indikator : Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Secara garis besar tujuan dari Dinas Ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja dan menciptakan kondisi Ketenagakerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja Dengan Indikator : a. Persentase Pencari Kerja Terdaftar Lulus Uji Kompetensi b. Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan c. Persentase Kasus Perselisihan HI yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/ Anjuran d. Tingkat Kepuasan Transmigran Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Strategi : 1. Mengatasi Tingkat Pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Pasuruan; 2. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja di kabupaten Pasuruan; 3. Peningkatan sinergi antara pelaku usaha dan unsur serikat;	Kebijakan : 1. Kebijakan pengembangan Perluasan info lowongan kerja melalui Aplikasi Online, maupun melalui jalur Offline / Job Fair untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja (pengusaha) 2. Kebijakan penyusunan program pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pasar kerja, serta memperkuat program sertifikasi dan pengakuan kompetensi. 3. Kebijakan memfasilitasi

		4. Mengatasi konflik Ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja; 5. Peningkatan pemberangkatan calon transmigran (Kualitas layanan serta Kuantitas CTKI/CPMI); 6. Optimalisasi operasional di UPT LKD Kabupaten Pasuruan; 7. Pemerataan Pelatihan kepada Tenaga Kerja di Kabupaten Pasuruan	dialog dan kerjasama antara pelaku usaha dan unsur serikat melalui penyelenggaraan forum-forum dialog, Sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. 4. Kebijakan memperkuat peran dan kapasitas dinas ketenagakerjaan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan utamanya melalui mediasi hingga menghasilkan anjuran (mengingat fungsi lebih lanjut sudah diambil alih oleh Pemprov Jatim melalui kebijakan penarikan Tenaga Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ke Provinsi). 5. Kebijakan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk mempercepat pemberangkatan calon transmigran. 6. Kebijakan memperkuat
--	--	---	--

			Program pelatihan dan Kualitas Instruktur Pelatihan; 7. Kebijakan memperkuat akses dan kualitas program pelatihan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan, serta memperluas kerjasama dengan pelaku industri dan lembaga-lembaga pelatihan di wilayah tersebut.
--	--	--	---

Tabel 3.2.A
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
Tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2025-2029				
Meningkatnya Partisipasi Tenaga Kerja Kab. Pasuruan	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.31%	71.42%	71.53%
Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja di Sektor Formal dan Non Formal	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	87%	94,00%	94,50%
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	N/a	Rp 124.487.176,00	Rp 128.656.779,00

	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola Kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, Lembaga Kerjasama Bipartit dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		9,58%	9,68%
	Persentase Monitoring Kawasan Transmigrasi	100%	51,00%	51,50%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP		80,45	80,75
SPM				
Indikator Kinerja Kunci (Outcome)				
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		70,55	70,55	70,55
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		93,50%	94,00%	94,50%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Rp. 128.319.078,22	Rp. 128.487.176,21	Rp. 128.656.779,28
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		9,49%	9,58%	9,68%
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		40,50%	41,00%	41,50%

IKK Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	Presentase Monitoring Kawasan Transmigrasi	50,5%	51%	51,50%
	Meningkatnya Akuntabilitas IP	80,70%	80,70%	80,75%

Tabel 3.2.B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka	AK yang menganggur dibagi Jumlah Angkatan Kerja	5,76	Persentase Angkatan Kerja yang mendapatkan Kerja		94,30%	Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		94,50%	Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Rp 128.656.779,00	Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola Kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, Lembaga Kerjasama Bipartit dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		9,68%	Hubungan Industrial
			Persentase Monitoring Kawasan Transmigrasi		51,50%	Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja

3.1.1 Tujuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian perangkat daerah. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, yang tertuang dalam tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, antara lain :

1. Mewujudkan pemerintah yang demokratis, berkeadilan dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kompetensi, iman dan taqwa.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih maju, mandiri dan dinamis dengan mengoptimalkan potensi daerah, pembangunan wilayah dan kemitraan serta pemeliharaan stabilitas pengembangan dunia usaha.

Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan, ditetapkan tujuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

" Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja "
dengan Indikator Tujuannya adalah :
" Persentase Angkatan Kerja Yang Mendapatkan Kerja "

3.1.2 Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas serta pernyataan tujuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan ditetapkanlah sasaran Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Sasaran :

" Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Formal dan Non Formal “.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah :’

1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi :

Yang diukur melalui Jumlah Pencari Kerja yang Lulus UJK dan Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan Kerja.

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang lulus UJK}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pelatihan Kerja}} \times 100 \%$$

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Yang diukur melalui Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100 \%$$

3. Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, Lembaga Kerjasama Bipartit dan KepesertaanBPJS Ketenagakerjaan)

Yang diukur melalui Jumlah Perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak dan Jumlah Perusahaan di Kabupaten Pasuruan

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yg Menerapkan Tata Kelola Kerja yg Layak}}{\text{Jumlah Perusahaan di Kab. Pasuruan}} \times 100 \%$$

4. Persentase Monitoring Kawasan Transmigrasi

Yang diukur melalui Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dimonitoring dan Jumlah Kawasan Penempatan Transmigrasi

$$\frac{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang di Monitor}}{\text{Jumlah Kawasan Penempatan Transmigrasi}} \times 100 \%$$

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Bukan Indikator Kinerja Utama/Non-IKU) yang diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

- Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kinerja yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Pasuruan

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Adapun Kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan :

- ❖ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- ❖ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan :

- ❖ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

- 4) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Sub Kegiatan :

- ❖ Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

- 5) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Prioritas 1

b. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
- ❖ Pelayanan antar Kerja
- ❖ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- ❖ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- ❖ Perluasan Kesempatan Kerja

2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
- ❖ Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Sub Kegiatan :

- ❖ Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
- ❖ Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- ❖ Job Fair/Bursa Kerja

4) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/KotaqPeningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sub Kegiatan :

- ❖ Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
- ❖ Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon
- ❖ Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran

5) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Prioritas 1

a. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- ❖ Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
- ❖ Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- ❖ Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja

4. Tugas Pilihan

b. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Penyuluhan Transmigrasi

5. Prioritas Rutin

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Pengadaan Mebel

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- ❖ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang tercantum di RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Tahun 2026

IKU	Tema 2025	Prioritas Pembangunan	Subkegiatan	Kegiatan	Program
		Prioritas Pembangunan			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif	Penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Tabel 3.5
 Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah
 Tahun 2026

Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
ASIAP: Aplikasi Sistem Informasi Lembaga Pelatihan	Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan LPK Swasta	Pembinaan LPK Swasta	
PELITA : PELAPORAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN	Penunjang Urusan Pmerintahan kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
SI EDI (SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK MEDIASI)	Hubungan Industrial	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Arah kebijakan dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 - 2029 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan merupakan program prioritas RPD Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan untuk urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi dari tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) program wajib dimana terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas 1

a. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Adapun Kegiatan pada program ini sebagai berikut:

6) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan :

- ❖ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- ❖ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

- 7) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Sub Kegiatan :
 - ❖ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 8) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Sub Kegiatan :
 - ❖ Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
- 9) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Sub Kegiatan :
 - ❖ Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 10) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - ❖ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Prioritas 1

b. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 6) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - ❖ Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - ❖ Pelayanan antar Kerja
 - ❖ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - ❖ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - ❖ Perluasan Kesempatan Kerja
- 7) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - ❖ Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
 - ❖ Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
- 8) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Sub Kegiatan :
 - ❖ Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - ❖ Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

❖ Job Fair/Bursa Kerja

- 9) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sub Kegiatan :

❖ Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

❖ Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon

❖ Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran

- 10) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Prioritas 1

a. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 3) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

❖ Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

❖ Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

❖ Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

- 4) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

❖ Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

❖ Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang

Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- ❖ Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja

4. Tugas Pilihan

b. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 2) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Penyuluhan Transmigrasi

5. Prioritas Rutin

b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 8) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 9) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Pengadaan Mebel

11) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

12) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dalam rangka mengimplementasikan visi-misi pembangunan daerah agar lebih menarik, mudah dikenal dan diingat masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan beberapa “program unggulan”. Program unggulan tersebut secara operasional teridentifikasi melalui program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.07.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	Prosentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi		1	6,242,823,855	DAU		100	9,287,975,226
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi nya dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	Prosentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi		1	Rp 29,737,000	DAU		100%	35,529,230
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhi nya dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	Prosentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	Dinas Ketenagakerjaan	1	Rp 29,737,000	DAU		100%	35,529,230
2.07.01.2.02						Belanja operasi : Rp 32,299,300				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 32,299,300				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum	Prosentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100	Rp	159,215,100	DAU		100	230,294,580
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Dinas Ketenagakerjaan	12	Rp	10,265,000	DAU		12	7,768,200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Ketenagakerjaan	4	Rp	20,132,100	DAU			20,132,100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Ketenagakerjaan	3	Rp	19,960,000	DAU		3	26,571,600
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Ketenagakerjaan	100	Rp	20,350,000	DAU		100	19,965,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Dinas Ketenagakerjaan	50	Rp	88,508,000	DAU		50	155,857,680
	...					Belanja operasi : Rp	159,215,100				
						Belanja pegawai : Rp	-				
						Belanja barang dan jasa : Rp	159,215,100				
						Belanja bunga : Rp	-				
						Belanja subsidi : Rp	-				
						Belanja hibah : Rp	-				
						Belanja bantuan sosial : Rp	-				
						Belanja modal : Rp	-				
						Belanja tidak terduga : Rp	-				
						Belanja transfer : Rp	-				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		100	Rp	158,550,200	DAU		(diisi)	834,657,825
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Ketenagakerjaan	1	Rp	10,050,200	DAU		900	18,150,000
2.07.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Ketenagakerjaan	1	Rp	-	DAU		12	756,834,255
2.07.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Dinas Ketenagakerjaan	1	Rp	-	DAU		1	26,882,570
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Ketenagakerjaan	1	Rp	148,500,000	DAU		1	32,791,000
						Belanja operasi : Rp	158,550,200				
						Belanja pegawai : Rp	-				

2.07.01.2.08						Belanja barang dan jasa	:	Rp	158,550,200					
						Belanja bunga	:	Rp	-					
						Belanja subsidi	:	Rp	-					
						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
						Belanja modal	:	Rp	-					
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
						Belanja transfer	:	Rp	-					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan P	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia		100			Rp	625,284,055	DAU		(diisi)		834,657,825
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase pengadaan BMD yang terealisasi	Dinas Ketenagakerjaan	900			Rp	15,400,000	DAU		900		18,150,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketenagakerjaan	12			Rp	547,122,855	DAU		12		756,834,255
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketenagakerjaan	1			Rp	21,359,000	DAU		1		26,882,570
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Dinas Ketenagakerjaan	1			Rp	41,402,200	DAU		1		32,791,000
						Belanja operasi	:	Rp	625,284,055					
						Belanja pegawai	:	Rp	-					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	625,284,055					
						Belanja bunga	:	Rp	-					
						Belanja subsidi	:	Rp	-					
						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
						Belanja modal	:	Rp	-					
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
						Belanja transfer	:	Rp	-					
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD kondisi baik	Prosentase BMD kondisi baik		100			Rp	432,976,500	DAU		100		191,004,000
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Ketenagakerjaan	14			Rp	151,716,500	DAU		14		136,488,000
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Ketenagakerjaan	14			Rp	22,960,000	DAU		14		23,716,000
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Dinas Ketenagakerjaan	2			Rp	84,680,000	DAU		2		16,500,000
2.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Dinas Ketenagakerjaan	2			Rp	173,620,000	DAU		2		14,300,000

2.07.02						Belanja operasi	:	Rp	432,976,500					
						Belanja pegawai	:	Rp	-					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	432,976,500					
						Belanja bunga	:							
						Belanja subsidi	:	Rp	-					
						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
						Belanja modal	:	Rp	-					
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
						Belanja transfer	:	Rp	-					
	...													
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RTKD Makro	Prosentase RTK yang dievaluasi sesuai ketentuan		100			Rp	12,140,000	DAU		100		35,000,000
	2.07.02.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RTKD Makro	Dinas Ketenagakerjaan	100			Rp	12,140,000	DAU		100		35,000,000
	2.07.02.2.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RTKD Makro	Dinas Ketenagakerjaan	1			Rp	12,020,000	DAU		1		35,000,000
	2.07.02.2.002	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Penyusunan Tenaga Kerja Mikro	Dinas Ketenagakerjaan	5			Rp	120,000			5		100,000,000
						Belanja operasi	:	Rp	12,140,000					
						Belanja pegawai	:	Rp	-					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	12,140,000					
						Belanja bunga	:	Rp	-					
						Belanja subsidi	:	Rp	-					
						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
						Belanja modal	:	Rp	-					
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
	...					Belanja transfer	:	Rp	-					
														
2.07.03.2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi		50			Rp	7,378,771,181	DAU				Rp 13,781,223,247
2.07.03.2.01	Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan	500			Rp	7,233,771,181	DAU		500		13,759,381,537
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kabupaten Pasuruan	500			Rp	6,228,671,181	DBHCHT	ASTACITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	500		12,759,800,537

[illegible]

2.07.03.2.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	TerlaksanannyaKoordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kabupaten Pasuruan	1	Rp	100,000	DAU	ASTACITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas PRIORITAS BUPATI 20. Pengembangan pusat lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional	1	150,000,000	
	...											

2.07.03.2.03									
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Proses Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		100	Rp24,600,000	DAU	100	1,730,300
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Tersedianya SDM Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	Jumlah SDM Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi		2	Rp24,600,000	DAU	2	1,730,300
			Kabupaten Pasuruan						
	...								
						Belanja operasi : Rp24,600,000			
						Belanja pegawai : Rp-			
2.07.03.2.03.01						Belanja barang dan jasa : Rp24,600,000			
						Belanja bunga : Rp-			
						Belanja subsidi : Rp-			
						Belanja hibah : Rp-			
						Belanja bantuan sosial : Rp-			
						Belanja modal : Rp-			
						Belanja tidak terduga : Rp-			
						Belanja transfer : Rp-			
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		50	Rp24,353,000	DAU	50	1,730,300

[illegible]

						Belanja operasi	:	Rp	22,512,000				
						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	22,512,000				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
	2.07.05.2												
2.07.05.2.01		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terlaksananya Penempatan Pencari Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan		41.5		Rp	240,530,000	DAU			
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananay Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota	Prosentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		100		Rp	130,430,000	DAU		100	67,100,000
2.07.05.2.01.01		Pelayanan antar Kerja	Terlaksananya Pelayanan AKAD AKL kepada Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Layanann AKAD dan AKL	Kabupaten Pasuruan	5000		Rp	75,430,000	DAU	ASTACITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PRIORITYAS BUPATI 18. Cipta lapangan kerja untuk naker asli Pasuruan	1	-
2.07.05.2.01.02		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kabupaten Pasuruan	200		Rp	15,000,000	DAU	ASTACITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PRIORITYAS BUPATI 18. Cipta lapangan kerja untuk naker asli Pasuruan		18,700,000

2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terlaksananya Fasilitas Layanan ULD kepada Tenaga Kerja Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kabupaten Pasuruan	20	Rp	35,000,000	DAU	ASTACITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PRIORITAS BUPATI 18. Cipta lapangan kerja untuk naker asli Pasuruan		42,350,000
2.07.05.2.02	Perluasan Kesempatan Kerja	Peserta Wirausaha Baru	Jumlah Peserta Wirausaha Baru	Kabupaten Pasuruan	160	Rp	5,000,000	DAU	ASTACITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan		6,050,000
	...										
						Belanja operasi	: Rp 130,430,000				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 130,430,000				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				
						Belanja modal	: Rp -				
						Belanja tidak terduga	: Rp -				
						Belanja transfer	: Rp -				
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Informasi Pasar Kerja	Prosentase Informasi Pasar Kerja		60	Rp	80,000,000	DAU		60	96,800,000
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan	1	Rp	40,000,000	DAU		1	48,400,000

2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya Fasilitasi Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistim Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistim Online	Dinas Ketenagakerjaan	100	Rp	10,000,000	DAU	ASTACITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PRIORITAS BUPATI 19. Kemudahan perizinan dan hubungan industrial	100	12,100,000
2.07.04.2.03.03	Job Fair/ Bursa Kerja	Terlaksananya Kegiatan Job Fair	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair Bursa Kerja	Kabupaten Pasuruan	5000	Rp	30,000,000	DAU	ASTACITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PRIORITAS BUPATI 19. Kemudahan perizinan dan hubungan industrial	5000	36,300,000
	...										
						Belanja operasi	: Rp 80,000,000				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 80,000,000				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				
						Belanja modal	: Rp -				
						Belanja tidak terduga	: Rp -				
						Belanja transfer	: Rp -				
	...										
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI	Prosentase Pelayanan Perlindungan PMI (PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah)		60	Rp	30,100,000	DAU		60	-

2.07.04,2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Terlaksanannya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		50	Rp	100,000				
2.07.04,2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kabupaten Pasuruan	25	Rp	30,000,000	DAU	ASTACITA 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 6. Membanaun dari desa	1	36,106,400
	...										
						Belanja operasi	: Rp 30,100,000				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 30,100,000				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				
						Belanja modal	: Rp -				
						Belanja tidak terduga	: Rp -				
						Belanja transfer	: Rp -				
						Belanja transfer	: Rp -				
2.07.05.2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perselisihan yang diselesaikan dengan Mediasi/ Anjuran	Prosentase PPHI yang diselesaikan dengan anjuran/PB		50	Rp	5,240,530,000	DAU			Rp 5,278,579,468
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online	Prosentase Perusahaan terdaftar yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online		75	Rp	300,000	DAU		100	77,000,000
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Fasilitasi Pengesahan PP PKB	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online	Dinas Ketenagakerjaan	30	Rp	100,000	DAU	ASTACITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan PRIORITAS BUPATI 32. Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh	1	11,000,000

2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Dinas Ketenagakerjaan	30	Rp100,000	DAU	ASTACITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	11,000,000
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terlaksananya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Dinas Ketenagakerjaan	15	Rp100,000	DAU	ASTACITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	55,000,000
	...					Belanja operasi : Rp300,000			
						Belanja pegawai : Rp-			
						Belanja barang dan jasa : Rp300,000			
						Belanja bunga : Rp-			
						Belanja subsidi : Rp-			
						Belanja hibah : Rp-			
						Belanja bantuan sosial : Rp-			
						Belanja modal : Rp-			
						Belanja tidak terduga : Rp-			
						Belanja transfer : Rp-			
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Prosentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan		50	Rp5,240,230,000		50	5,201,579,468
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelsaian perselisihan	Jumlah perselisihan yang berhasil dicegah	Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan	50	Rp100,000	DAU	ASTACITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan PRIORITAS BUPATI 32. Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh	50 57,579,940

2.07.05.2.02.02	<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Terlaksananya Penyelesaian Perkara Perselisihan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	<i>Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan</i>	50	<i>Rp 100,000</i>	DAU	ASTACITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan PRIORITAS BUPATI 32. Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh	50	41,800,000
2.07.05.2.02.03	<i>Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi</i>	Terlaksananya Verifikasi Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	<i>Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan</i>	5	<i>Rp 100,000</i>	DAU	ASTACITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan PRIORITAS BUPATI 32. Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh	5	36,454,000
2.07.05.2.02.04	<i>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Terlaksananya Pembinaan LKS Tripartit	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	<i>Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan</i>	5	<i>Rp 239,930,000</i>	DAU	ASTACITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan PRIORITAS BUPATI 32. Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh	5	65,745,528

2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan	47600	Rp 5,000,000,000	DBHCHT	ASTACITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan PRIORITAS BUPATI 32. Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh	47,600	Rp 5,000,000,000
						Belanja operasi : Rp 5,240,230,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 5,240,230,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya Tingkat Kepuasan Transmigran	Prosentase Tingkat Kepuasan Transmigran		100	Rp 5,000,000	DAU		100	5,000,000
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Tingkat Kepuasan Transmigran	Prosentase Tingkat Kepuasan Transmigran	Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan	100	Rp 5,000,000	DAU		100	5,000,000
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan	5	Rp 4,800,000	DAU		5	3,000,000
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan	5	Rp 100,000	DAU		5	Rp 1,000,000
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/ atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan	30	Rp 100,000	DAU		30	Rp 1,000,000
	...									
						Belanja operasi : Rp 5,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 5,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

						Total Belanja operasi	:	Rp	-	
						Belanja pegawai	:	Rp	4,821,041,000	
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	13,214,074,036	
						Belanja bunga	:	Rp	-	
						Belanja subsidi	:	Rp	-	
						Belanja hibah	:	Rp	-	
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-	
						Total Belanja modal	:	Rp	1,084,680,000	
						Total Belanja tidak terduga	:	Rp	-	
						Total Belanja transfer	:	Rp	-	
						Total Belanja PD	:	Rp	19,119,795,036	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

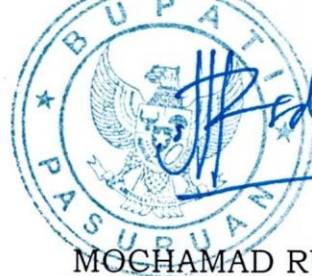
1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO